

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI 19 PERCONTOHAN BANDA ACEH

Ainul Mardiyah Usman¹, Cut Zahri Harun², Nasir Usman²

¹ Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

² Prodi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Koresponden: inulmasri@gmail.com

Abstract : *This study aimed to determine source of financing, planning, implementation and monitoring of education financing at State Junior High School No. 19 Percontohan (Pilot School) of Banda Aceh. This study used descriptive method with qualitative approach. The subjects of the study were the principal, vice principal, treasurer, teachers and school committees. The techniques used to collect the data were interviews, observation, and documentation. The results showed that: (1) Sources of financing for education were from the state budget, City budget, families, and society; (2) Financial planning of education or RAPBS was done by: that the principal directed vice principal, treasurer and school committee considered the input and output elements; (3) The implementation of education financing included: financing the disadvantaged students, pay honorariums of casual teachers, professional development (training), building maintenance, bought the tools of lessons, sports, arts, finance daily test of general and school, remedial, enrichment and procurement of mobile; and (4) Monitoring education financing was done by Inspectorate Team in Banda Aceh, the School Committee and functional supervision by the regional Inspectorate. The disadvantage was that in the financial planning of education had not been able to accommodate a variety of conditions and background of the students; not all teachers and donors were involved. Besides, the society is less concerned about the education financing that has been presented on the billboard.*

Keywords: *management, finance, and education*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sumber pembiayaan pendidikan berasal dari APBN, APBK, keluarga, dan masyarakat; (2) Perencanaan pembiayaan pendidikan atau RAPBS dilakukan dengan menggunakan: a) Logika, proses setapak demi setapak untuk menuju perubahan yang diharapkan, b) Menetapkan mekanisme *feed back* yang memberitahukan kemajuan peserta didik, dan menunjukkan perubahan-perubahan yang diperlukan, c) Menggunakan langkah yang jelas, mudah dikomunikasikan dan dipahami oleh orang lain, d) Mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan, e) Menentukan syarat-syarat dan alternatif pemecahannya, f) Melaksanakan strategi yang telah dipilih, g) Menentukan efektivitas hasilnya dengan jalan mengadakan evaluasi, h) Mengadakan revisi setiap langkah dan proses yang dilakukan; (3) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi: pembiayaan siswa kurang mampu, membayar honor GTT, pengembangan profesi (pelatihan), perawatan gedung, membeli alat-alat pelajaran, olahraga, kesenian, membiayai ulangan harian/umum dan sekolah, remedial, pengayaan dan pengadaan mobiler; dan (4) Pengawasan pembiayaan dilakukan secara melekat oleh Tim Inspektorat Kota Banda Aceh, Komite Sekolah dan pengawasan fungsional oleh Bawasda. Kelemahan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan adalah belum dapat mengakomodasi berbagai kondisi dan latar belakang siswa, tidak semua guru, donatur dilibatkan, dan masyarakat kurang peduli terhadap pembiayaan pendidikan yang telah dipaparkan di papan pengumuman.

Kata kunci: pengelolaan, pembiayaan, dan pendidikan

PENDAHULUAN

Rendahnya mutu pendidikan selalu dikaitkan dengan kualitas sumber daya pendidikan, sehingga

efisiensi menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting dalam menjalankan roda pendidikan. Anwar (2013) menyatakan bahwa "berperannya pendidikan

baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pendidikan tidak lepas dari adanya sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan inilah muncul permasalahan mengenai pembiayaan pendidikan”. Pengelolaan pembiayaan pendidikan mempunyai manfaat yang cukup besar bagi kelangsungan pembelajaran di sekolah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan bersumber dari partisipasi masyarakat untuk meningkatkan jalannya rodpendidikan, tanpa partisipasi masyarakat, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik” (Muhajirin, 2012). Menurut Muhajirin (2012), “biaya pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung (sumber daya pendidikan) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam upaya pencapaian tujuan, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan untuk kelangsungan pendidikan”.

Untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menyusun standar pendidikan nasional pembiayaan pendidikan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan sesuai juga dengan “Konstitusi Amandemen UUD 1945” yang mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari dana APBN maupun APBD. Adapun landasan hukum standar nasional pembiayaan pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 11 Ayat 2 berbunyi “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggarakan pendidikan bagi warga Negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”.

SMPN 19 Percontohan Banda Aceh merupakan salah satu SMPN unggul di Kota Banda Aceh. Adapun siswa-siswi SMP tersebut merupakan siswa-siswi pilihan, yang direkrut dari berbagai kalangan dan yang prestasi yaitu siswa yang memiliki peringkat 1 – 5 saat di bangku Sekolah Dasar atau yang memiliki nilai rata-rata rapornya 7,5. Ketentuan ini berdasarkan panduan penerimaan siswa baru pada SMPN 19 Percontohan Banda Aceh di setiap tahunnya. Setelah dinyatakan lulus sebagai

siswa baru di SMPN 19 Percontohan Banda Aceh, setiap siswa berwajib membayar biaya pendidikan (yang biasa disebut dengan uang komite) sebesar Rp.100.000,- per siswa per bulan. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah telah mengambil peran tersebut. Sejauh pengamatan penulis, siswa-siswi SMPN 19 Percontohan rata-rata berasal dari lingkungan keluarga berpendidikan dengan status ekonomi menengah ke atas, meskipun sebenarnya ada juga siswa-siswi yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Oleh karena adanya biaya pendidikan (yang disebut uang komite) tersebut, maka terasa memberatkan bagi sebagian wali siswa, sehingga menjadi sorotan masyarakat, karena SMPN 19 Percontohan Banda Aceh bukan sekolah swasta. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa uang sekolah (uang komite) bukan tanggung jawab wali siswa/masyarakat, tetapi tanggung jawab pemerintah, seperti dalam UUD 1945 pasal 31 yaitu bahwa: (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait dengan sumber-sumber pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan pada SMPN 19 Percontohan Banda Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh yang beralamat di Jalan Sultan Malikussaleh Lam Lagang Banda Aceh. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2016.

Subjek penelitian ini adalah subjek yang memiliki berbagai karakteristik yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan pada

SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh, yaitu Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, bendahara dan komite sekolah dan data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, sedangkan objek penelitiannya adalah sumber, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pada SMPN 19 Percontohan Banda Aceh. Instrumen dalam penelitian kualitatif berupa test, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa “instrumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa test, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner”. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstruktur secara baku dan telah disusun sebelum wawancara berlangsung.

Menurut Nasution (2007) “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.” Kegiatan analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- tahap reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan;
- tahap penyajian data (*data display*) yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat berupa uraian, matrik, grafik, atau bagan;
- tahap penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Penyusunan kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung sehingga akan menjamin kredibilitas dan objektifitas penelitian.

Adapun data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana

pengelolaan pembiayaan pendidikan pada SMPN 19 Percontohan Banda Aceh yang difokuskan pada sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh, perencanaan yang dijadikan patokan, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Pembiayaan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber keuangan dan pembiayaan di sekolah dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: (1) pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang bersifat umum atau khusus; (2) orang tua peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Hal ini sejalan dengan ungkapan Mulyasa (2013) bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan, yaitu:

- a) kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu tempat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia/*human capital*
- b) pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan siswa untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada *social benefit* secara keseluruhan.
- c) pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

Minimal ada tiga variabel utama yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah yang kesemuanya berpengaruh kepada siswa pada saat terjadinya proses pengajaran. Supriyadi (2010) menjelaskan bahwa “kontribusi keluarga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi pemerintah, namun angka ini juga sekaligus menunjukkan besarnya komitmen keluarga Indonesia terhadap pendidikan”.

Hasil penelitian dapat disimpulkan, sumber dana dari orang tua/masyarakat pada dasarnya sangat

menentukan kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang tua meliputi uang harian berupa biaya transportasi, uang jajan anak ke sekolah, pembelian perlengkapan sekolah seperti baju seragam, alat tulis dan buku tulis, buku penunjang mata pelajaran, serta sumbangan wajib perbulan Rp 100.000.

Perencanaan Pembiayaan Pendidikan SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh dilakukan secara rutin tiap tahun ajaran atau awal semester setiap 6 bulan sekali yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, siswa, bendahara dan komite sekolah sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan anggaran. Fattah (2012) mengungkapkan bahwa “anggaran mempunyai fungsi manajemen, baik perencanaan maupun pengawasan. Oleh karena itu, ketepatan desain anggaran menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan”.

Pihak sekolah menyusun RAPBS berdasarkan anggaran rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, biaya pemeliharaan serta belanja modal. Dana pendidikan dari APBK diperuntukkan bagi intensif wali kelas. Sedangkan APBN diperuntukkan untuk pengembangan kompetensi lulusan seperti pengayaan sore hari bagi kelas IX semester genap dan ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Pengembangan profesi guru, pembiayaan remedial dan pengayaan, PMR, dan rehabilitasi gedung dan pengadaan mobiler lainnya yang dianggap sedang tidak berat dan tidak membutuhkan dana yang banyak.

Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh dialokasikan untuk semua pos, yang terdiri biaya langsung dan biaya tidak langsung. Menurut Rusdiana (2015) “biaya langsung terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi,

gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri”. Sedangkan biaya tidak langsung sebagaimana dikemukakan oleh Thomas dan Jone dalam Fattah (2012) yaitu: “biaya tidak langsung (*indirect cost*) berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas buku tulis)”.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Banda Aceh, orang tua dan dari sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat. Semua biaya tersebut digunakan untuk: penerimaan siswa baru (PSB), pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi, kegiatan remedial/pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, PMR, membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, membeli bahan habis pakai, biaya perawatan sekolah, membayar honor GTT, pengembangan profesi, karya ilmiah, pengadaan mobiler dan alat peraga sekolah.

Pengawasan Pembiayaan Pendidikan SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh

Fattah (2012) mengatakan bahwa “prosedur pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: memantau (*monitoring*), menilai, dan melaporkan hasil temuan kegiatan monitoring terhadap kinerja aktual (*actual performance*), baik dalam proses maupun hasilnya.” Pengawasan pembiayaan pendidikan di SMPN 19 Percontohan Banda Aceh dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kota Banda Aceh, Komite Sekolah dan Bawasda/Inspektorat dengan cara melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah yang dilakukan setiap triwulan dan semester, Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten Kota bisa saja diwakili oleh pihak BPKP atau pihak lain yang ditunjuk.

KESIMPULAN

1. Penyusunan perencanaan pembiayaan pendidikan meliputi: a) menetapkan mekanisme *feed back* yang memberitahukan

kemajuan peserta didik, identifikasi hambatan-hambatan dan menunjukkan perubahan-perubahan yang diperlukan, b) menggunakan langkah yang jelas, mudah dikomunikasikan dan dipahami oleh orang lain, c) mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan, d) Menentukan syarat-syarat dan alternatif pemecahannya, e) melaksanakan strategi yang telah dipilih untuk mencapai hasil yang diharapkan, f) menentukan efektivitas hasilnya dengan jalan mengadakan evaluasi dalam pelaksanaan pembiayaan, g) mengadakan revisi bila perlu setiap langkah dan proses yang dilakukan.

2. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh dilakukan untuk membiayai siswa kurang mampu, membayar honor GTT, pengembangan profesi (pelatihan), perawatan gedung, membeli alat-alat pelajaran, olahraga, kesenian, membiayai ulangan harian/umum dan sekolah, remedial, pengayaan dan pengadaan mobiler, namun dalam pengadaan gedung dan mobiler yang membutuhkan dana yang banyak masih membutuhkan uluran masyarakat/orang tua siswa dan pemerintah.
3. Pengawasan pembiayaan pendidikan di SMPN 19 Percontohan Banda Aceh dilakukan secara melekat oleh Tim Manajemen Kota Banda Aceh, komite sekolah dan pengawasan fungsional oleh Bawasda/Inspektorat terhadap RAPBS, Kas dan peralatan, namun kurang melibatkan masyarakat dan orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, I. 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.
- Fattah, N. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhajirin. 2012. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Partisipasi

Masyarakat". *Jurnal Educational Management*,1(2), 171.

- Mulyasa, E. 2013. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nasution, S. 2007. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito, Bandung.
- Rusdiana, A. 2015. *Pengelolaan Pembiayaan*, Pustaka Setia, Bandung
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung.
- Supriyadi. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Menengah*, Remaja Rosdakarya, Bandung.